

Rekonsiliasi Politik Setelah Idulfitri

BENAR apa yang ditulis harian ini dalam tajuknya bahwa kalangan elite yang secara demonstratif kerap memper-tontonkan simbol-simbol keberagaman sebagai sarana untuk kesalehan diri, kini saatinya membuktikan bahwa semua pertanda fisik tingkat religiusitas yang tinggi itu memang merefleksikan nilai-nilai kesalehan yang substantif (*Pikiran Rakyat*, 10 Juni 2019).

Oleh karena itu, hanya dengan semangat silaturahmi dan nilai-nilai persaudaraan kita bisa segera berekonsiliasi merekatkan ukhuwah yang sempat merenggang.

Harus kita akui, meski hasil pemilihan presiden pada Pemilu 2019 telah diumumkan, situasi politik tanah air masih memanas. Itulah sebabnya, berbagai upaya "mendinginkan" suhu politik usai Pemilu 2019 banyak dilakukan orang-orang yang masih punya pengaruh besar di masyarakat.

Tak kurang dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie mencoba bertandang ke Istana Merdeka, 24 Mei, untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga pernah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 2 Mei 2019, atas undangan Presiden Jokowi. Meski begitu, komunikasi antarelite politik tersebut tam-



Alex Sobur

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung

paknya belum sepenuhnya dapat meredakan ketegangan di tengah pendukung capres-cawapres ketika dua capres yang berkontestasi belum bertemu. Terlebih lagi, kontestasi Jokowi dan Prabowo sejak Pilpres 2014 telah membelah sebagian masyarakat kita.

Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, lebih dari separuh responden mengikuti rangkaian pertemuan elite politik yang berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019. Lebih separuh dari responden meyakini situasi politik di Indonesia akan lebih baik setelah Lebaran.

Pertemuan rekonsiliasi dua calon presiden tersebut tampaknya masih terus dinanti responden (*Kompas*, 10 Juni 2019). Sementara itu, berbagai lapisan masyarakat pun berharap agar para elite politik dari kedua kubu bisa lebih mengedepankan proses rekonsiliasi.

Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud dengan mengedepankan rekonsiliasi dalam menyikapi konflik yang—bahkan—sampai melibatkan kekerasan? Kapan praktik-praktik rekonsiliasi bekerja

guna menetralisasi konflik-konflik politik?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang perlu disikapi secara lebih serius, sebab berbagai lembaga serta kebijakan yang dirancang guna mengatasi konflik politik belakangan ini tengah gencar dikembangkan di seluruh dunia.

Teori rekonsiliasi

Masyarakat yang tengah terpolarisasi memerlukan teori rekonsiliasi yang layak, teori yang secara serius mempertimbangkan perubahan politik, sosial, dan material yang dihadapi masyarakat, serta teori yang secara normatif bisa dipertahankan.

Jika kita mengacu pada perdebatan ihwal teori politik kontemporer mengenai cara terbaik mengonsepsikan rekonsiliasi politik seraya mengatasi kendala yang dihadapi, maka kita harus memahami rekonsiliasi, sebagaimana ditawarkan Ernesto Verdeja (2012). Yakni, "Kondisi saling menghormati di antara mantan-mantan musuh, yang mensyaratkan pengakuan timbal balik atas nilai-nilai moral

dan martabat pihak lain. Rekonsiliasi dicapai ketika konflik identitas di era sebelumnya tidak lagi beroperasi sebagai pemecah utama dalam politik, dan dengan demikian warga memperoleh identitas baru yang melintasi garis-garis kesalahan sebelumnya."

Dari paparan Verdeja tersebut jelas bahwa rekonsiliasi mengharuskan kita untuk menolak sikap saling keterasingan dan mendukung kondisi saling menghormati serta bersikap toleran terhadap orang lain. Termasuk yang paling penting, mantan musuh.

Rekonsiliasi dengan demikian harus kita maknai sebagai pencapaian atas timbulnya sikap saling menghormati di masyarakat. Ide tentang rasa hormat berporos pada konsepsi kepribadian moral.

Satu identitas yang sehat berkembang dari pengakuan intersubjektif antara yang sederajat, yang meliputi pengakuan timbal balik klaim atas nilai moral dan martabat.

Martabat pada dasarnya merupakan properti fundamental mengenai apa artinya menjadi seseorang, sebab ia menunjukkan nilai otonomi yang merupakan inti dari pemahaman diri yang sehat, dan restorasinya sangat penting bagi para korban dan orang lain yang telah mengalami pelecehan politik dan stigmatisasi serta tetap teraniaya dan mengalami devaluasi. Satu masyarakat yang ber-

usaha berdamai harus menciptakan kondisi yang mengakui bahwa semua warga negara sebagai pembawa nilai moral dan martabat.

Bagaimanapun, rekonsiliasi memerlukan sejumlah kebaikan moral yang wajar: pemahaman yang akurat tentang masa lalu, akuntabilitas, pengakuan korban, dan terutama aturan hukum. Rekonsiliasi bisa merupakan pijakan terindah setelah satu bulan lamanya umat Islam menunaikan ibadah suci Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah swt menganugerahkan *rahmah* (kasih sayang), *maghfirah* (ampunan), serta *'itqun minannaar* (pembebasan dari api neraka).

Seusai Ramadan, semoga kita, kaum Mukmin, bisa menjadi manusia baru. Hamba yang sebenarnya di hadapan Tuhan, sekaligus khalifahNya di muka bumi. Mukmin sejati yang hanya menyembah Allah tidak sekadar mencintai-Nya, tetapi juga mencintai—atau setidaknya, tidak membenci—hamba-hamba-Nya yang lain.

Beruntunglah kita punya tradisi unik dalam memeriahkan Idulfitri. Di dalamnya ada acara silaturahmi di antara kita. Pada momentum seperti ini kita pun berharap terbangunnya rekonsiliasi politik di antara dua kubu yang bertikai, sebagai salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai dan makna silaturahmi. Semoga.***